

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha mikro sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Mikro sebagai salah satu sektor dalam usaha mikro, kecil, dan menengah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Masdiantini *et al.*, 2022). Sebagai salah satu elemen penting dalam perekonomian, Usaha Mikro memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Sulistyawati (2020), mengemukakan selain berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, Usaha mikro juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Dengan pengelolaan yang tepat, Usaha mikro dapat dijadikan model usaha kecil yang mampu berkembang dengan cepat dan berkelanjutan.

Usaha mikro memiliki peran yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat saat ini karena kontribusinya yang signifikan dalam pemerataan pendapatan. Selain itu, usaha mikro juga menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, yang mana sektor ini berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), disebutkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp. 9.580 triliun, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Di Indonesia, UMKM mendominasi struktur ekonomi, dengan jumlah mencapai 66 juta unit usaha pada tahun 2024 atau sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha.

Usaha mikro di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan dan pertumbuhan mereka. Beberapa kendala yang harus dihadapi meliputi kapasitas sumberdaya, akses pembiayaan terbatas, pengetahuan pengelolaan keuangan, kurangnya akses ke pasar teknologi serta permasalahan lain yang bisa menghambat perkembangannya pada usaha itu sendiri (Sukmantari & Julianto, 2022). Usaha mikro bersama usaha kecil dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, meskipun perannya begitu penting usaha mikro sering menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka dengan baik. Kebanyakan pelaku usaha lebih berfokus pada aspek penjualan barangnya dan hasil usaha yang mereka dapatkan tanpa dilakukan pengelolaan keuangan dengan baik yang mana biasanya akan dihabiskan untuk konsumsi pribadi dan keluarganya (Sanjaya, 2021). Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak mencapai kinerja usaha yang maksimal, waktu yang kurang efektif, dan bahkan biaya serta tenaga yang dibutuhkan semakin besar. Kondisi ini yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan mereka.

Provinsi Bali merupakan wilayah yang memiliki luas 5.636.66 km atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari sembilan Kabupaten/Kota, di antaranya : Kabupaten Gianyar, Jembrana, Buleleng, Tabanan, Bangli, Badung, Karangasem, Klungkung, dan Denpasar. Di antara Kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas yang memiliki populasi yang signifikan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang besar untuk pengembangan usaha baik dari skala mikro, kecil, dan menengah. Seiring dengan pertumbuhan dan pariwisata di Bali, usaha mikro di Kabupaten Buleleng telah berkontribusi secara signifikan terhadap lapangan kerja dan perekonomian daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah UMKM terlihat dari data berikut:

**Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2024**

No	Klarifikasi Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	47.311	55.173	66.979	76.211
2.	Usaha Kecil	9.654	10.827	11.781	12.107
3.	Usaha Menengah	234	351	396	439
4.	Usaha Besar	17	17	314	493
	<b>Total</b>	<b>57.216</b>	<b>66.368</b>	<b>79.470</b>	<b>89.250</b>

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa benar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan di

tahun 2024 terlihat signifikan yaitu meningkat sebesar 9.780 dari tahun 2023. Dari tabel terlihat pula bahwa UMKM sendiri didominasi oleh pelaku usaha mikro. Dimana pada tahun 2024, jumlah pelaku usaha mikro mengalami peningkatan yang signifikan dari kategori usaha kecil dan menengah yaitu meningkat sebesar 9.232 dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor usaha mikro terus berkembang dan menjadi pendorong pertumbuhan UMKM secara keseluruhan. Terdapat pula sektor-sektor dalam usaha mikro, kecil, dan menengah ini antara lain sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian non pertanian.

Berdasarkan perolehan data perkembangan jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi usaha di Kabupaten Buleleng di atas, dapat diketahui bahwa minat masyarakat dalam berwirausaha mengalami peningkatan terutama dalam skala usaha mikro. Adapun perolehan data usaha mikro di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng yakni sebagai berikut.

**Tabel 1. 2 Data Usaha Mikro tiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng 2024**

No	Kecamatan	Data Perkecamatan
1	Gerokgak	1.447
2	Seririt	647
3	Busungbiu	226
4	Banjar	932
5	Sukasada	997
6	Buleleng	2.499
7	Sawan	1.106
8	Kubutambahan	745
9	Tejakula	633
<b>Jumlah</b>		<b>9.232</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng (2025)

Akan tetapi, walaupun terjadi peningkatan jumlah UMKM terutama dalam kategori usaha mikro di Kabupaten Buleleng, masih terdapat pula kendala atau permasalahan yang dihadapi terkait dengan kinerja usaha mikro, diantaranya masalah keterbatasan ketersediaan modal, kurangnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi oleh pelaku usaha (Rusman, 2023), tingginya biaya operasional, dan fluktuasi permintaan. Permasalahan mengenai kinerja ini masih dialami hingga tahun 2025. Berikut data performa kinerja UMKM di provinsi Bali sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Performa Kinerja UMKM Provinsi Bali**

No.	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk (UMKM) Tahun 2023	Persentase Performa Kinerja
1.	Buleleng	5.321	20,79%
2.	Denpasar	4.308	17,12%
3.	Gianyar	4.249	16,88%
4.	Badung	3.594	14,28%
5.	Tabanan	2.511	9,98%
6.	Jembrana	2.370	9,42%
7.	Bangli	1.222	4,86%
8.	Karangasem	1.067	4,24%
9.	Klungkung	614	2,44%
<b>Jumlah</b>		<b>25.166</b>	<b>100%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat kinerja yang rendah yakni sebesar 5.231 atau 20,79%. Hal ini menandakan bahwa banyak usaha yang mengalami stagnasi dan tidak mengalami perkembangan selama masa operasinya jika dibandingkan dengan UMKM di wilayah lainnya. Performa ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan, penurunan, maupun konstan yang berhubungan dengan perkembangan usaha dari pelaku usaha. Tingkat performa ini dapat diukur berdasarkan jumlah aset maupun laba usaha yang diperoleh suatu

usaha dalam satu periode tertentu. Oleh sebab itulah penulis memilih Kabupaten Buleleng ini sebagai lokasi penelitian.

Dalam menunjang kinerja usaha yang baik pelaku usaha harus memahami bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan pada usahanya. Pengelolaan keuangan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang ilmu akuntansi yang dimilikinya, yang menyebabkan pelaku usaha tidak mampu dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan hal ini yang akan mempengaruhi kinerja pada usaha mereka. Menurut Suindari & Juniariani (2020) dalam penelitiannya mengatakan jika profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku usaha dalam menangani pengelolaan usaha yang dimulai dengan menyusun anggaran, perencanaan simpan pinjam dana usaha hingga pengetahuan dasar atas keuangan dalam mencapai tujuan keuangan usaha.

Teori atribusi adalah konsep tentang unsur-unsur apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Teori ini mendeskripsikan bahwa tindakan seseorang akan muncul dari dalam dan luar dirinya (Suardana & Musmini, 2020). Kinerja merupakan suatu output yang dihasilkan individu secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Kinerja dapat diukur dengan melihat faktor dari dalam maupun luar individu tersebut. Sehingga teori atribusi digunakan karena mampu menjelaskan faktor-faktor dari dalam maupun luar yang berpengaruh pada kinerja. Kinerja suatu organisasi dapat diukur secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja suatu organisasi juga dapat diukur dengan menggunakan kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Dalam penelitian ini, kinerja diukur

dengan menggunakan kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur melalui total pendapatan, laba bersih, dan arus kas dalam periode akuntansi tertentu. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi seseorang di dalam melakukan tindakan, atau factor yang memengaruhi kinerja seseorang yaitu factor dari dalam (internal) maupun luar individu tersebut (eksternal). Faktor internal adalah sikap dan kualitas pribadi (Suardana & Musmini, 2020). Sebaliknya factor eksternal merupakan sikap seseorang yang disebabkan oleh factor luar. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan pada penelitian ini yakni literasi keuangan, perilaku keuangan dan pengendalian biaya. Fokus pada faktor internal, seperti literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pengendalian biaya memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu atau organisasi dapat mengontrol dan memengaruhi hasil kinerja keuangan mereka. Penelitian Hartina *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, yang menengaskan bahwa faktor internal lebih dominan dalam pengambilan keputusan strategis terkait keuangan. Disamping itu, dalam penelitian Rusnawati & Rusdi (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan secara langsung dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Dimana hal ini menunjukkan bahwa indikator internal lebih mudah diintervensi dibandingkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi pasar yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar untuk diubah.

Literasi keuangan (*finance*) merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang terampil dalam mengelola sumber pendapatan serta mengelola keuangan pribadinya. Literasi keuangan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja usaha, didefinisikan sebagai pemahaman seseorang terhadap

pengelolaan keuangan yang efektif dalam pengambilan keputusan keuangan agar mempengaruhi usaha yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan Daud *et al.*, (2023). Literasi keuangan yang baik akan turut mendorong tingkat kesejahteraan seseorang dikarenakan akan membuat seseorang akan menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, literasi keuangan menjadi hal yang seharusnya dimiliki untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan kinerja jangka panjang (Masdiantini *et al.*, 2024). Literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman pemilik usaha mikro tentang manajemen keuangan. Pelaku usaha akan sangat terbantu pengelolaan keuangannya dengan literasi yang memadai, mulai dari penganggaran, perencanaan simpanan dana serta pemahaman dasar keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha. Berdasarkan Hasil Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 20,70 persen pada tahun 2016, 38,03 persen pada tahun 2019, dan 49,68 persen pada tahun 2022. Meskipun ada peningkatan signifikan, tingkat literasi keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali masih memerlukan perhatian lebih karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara optimal pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi yang sistematis, serta pemanfaatan layanan keuangan formal.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa sebagian besar usaha dengan skala mikro ini masih ada yang belum melakukan pencatatan keuangan pada usahanya. Padahal, dengan adanya catatan keuangan ini akan menghasilkan suatu informasi akuntansi, yang nantinya informasi ini akan

diperlukan oleh berbagai pihak dalam usaha tersebut baik oleh pemilik usaha, karyawan, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Ini dikarenakan informasi akuntansi memuat informasi mengenai data-data keuangan ataupun kondisi keuangan yang nantinya data-data keuangan ini akan dipergunakan dalam mengambil suatu keputusan.

Pada usaha pakaian Daniel Shop dan Rindy Laundry, pelaksanaan pencatatan keuangan untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit dilakukan. Padahal, pelaku usaha tersebut memiliki keinginan untuk melakukan pencatatan keuangan, akan tetapi terhalang oleh pengetahuan serta kemampuan mengenai akuntansi yang dimilikinya. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kemampuan akuntansi yang dimiliki tersebut menyebabkan para pelaku usaha memiliki persepsi bahwa pencatatan keuangan ini tidak begitu penting untuk dilakukan karena bagi pelaku usaha tersebut tanpa melakukan pencatatan keuangan pun usahanya tetap berjalan.

Pada hal tanpa disadari pencatatan keuangan ini sangat penting dilakukan oleh suatu usaha karena dengan adanya catatan keuangan pemilik usaha dapat mengontrol keluar masuknya dana usaha, mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh, serta menjadi informasi keuangan bagi usahanya. Namun walaupun demikian, tidak sedikit juga pelaku usaha yang mengalami kendala karena tidak melakukan pencatatan keuangan. Pelaku usaha mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan maupun strategi yang tepat serta dalam mengelola keuangannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan literasi keuangan dari pelaku usaha dalam pengelolaan usahanya. Kondisi tersebut menjadikan pelaku usaha mikro perlu untuk mengetahui dan memahami literasi keuangan yang baik

agar dapat memperbaiki kinerja keuangannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kurniawati & Munari (2023) yang mana literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartina *et al.*, (2023) yang mana literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan usaha.

Mencapai kinerja keuangan yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman mengenai literasi keuangan namun perilaku keuangan juga memiliki peran penting untuk memaksimalkan kinerja keuangan usaha. Perilaku keuangan merupakan tanggung jawab seseorang dalam mengatur, mengelola, mengendalikan, mencari dan menyimpan uang yang dimiliki (Siregar & Simatupang, 2022). Pada saat menentukan keputusan keuangan, pelaku usaha diharapkan dapat secara rasional dan relevan dalam mendapat informasi sehingga dapat mengoptimalkan keputusan. Perilaku keuangan yang baik membantu pelaku usaha dalam mengoptimalkan keputusan yang diambil berdasarkan kondisi yang dialami usahanya. Pelaku usaha perlu memahami tentang perilaku keuangan agar dapat mengetahui tindakan keuangan yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialaminya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, tidak sedikit pelaku usaha yang telah melakukan pencatatan keuangan, akan tetapi pencatatan yang dilakukan masih bersifat sederhana. Pencatatan tersebut hanya mencatat stok awal saat usaha dibuka dan sisa stok saat usaha tutup tanpa memperhitungkan detail transaksi harian pemasukan, pengeluaran, dan laba bersih yang diperoleh. Tentunya pencatatan ini belum dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam usaha tersebut. Hal ini terjadi pada usaha Ayam Geprek dan pada usaha Nail Art.

Alasan pelaku usaha masih melakukan pencatatan yang sederhana ini karena pelaku usaha tidak memiliki pemahaman mengenai pencatatan keuangan yang lebih tepat dan juga karena pelaku usaha merasa catatan ini sudah cukup digunakan untuk mengetahui hasil penjualannya. Selain itu, pelaku usaha cenderung tidak disiplin dalam menggunakan keuntungan usaha, dimana pelaku usaha menggunakan keuntungan usahanya untuk membeli kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan alokasi dana untuk pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap perilaku keuangan, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan kondisi usaha yang sedang dijalankan (Asmin *et al.*, 2021). Perilaku keuangan yang bertanggungjawab membantu pelaku usaha untuk lebih bijak dalam mengalokasikan sumber keuangannya, dimana pengalokasian sumber keuangan yang baik ini dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian Nopiyani (2023), yang mengungkapkan bahwa perilaku keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan usaha.

Pengendalian biaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan usaha mikro. Pengendalian biaya yang efektif memungkinkan usaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, termasuk bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, dan layanan lainnya. Dalam konteks usaha, pengendalian biaya yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Pengendalian biaya pada dasarnya diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan tunggal maupun tujuan majemuk, yang ditetapkan melalui perencanaan strategis di awal proses manajemen (Hammer & Lawrence, 2018). Pengendalian

biaya yang ada pada suatu organisasi digolongkan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan investasi. Tujuan pengendalian biaya adalah menyediakan informasi biaya bagi manajemen untuk digunakan sebagai dasar mengambil keputusan dan alat pengendalian. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara melakukan perencanaan, pencatatan, penggolongan dan pelaporan biaya secara sistematis dan teratur. Penelitian yang dilakukan oleh Agu C *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pengendalian biaya yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan profitabilitas dan kinerja keuangan usaha.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, masih terdapat masalah yang dihadapi pelaku usaha yaitu penurunan margin keuntungan yang diperoleh pelaku usaha karena peningkatan beban biaya dalam pembelian produk. Penurunan margin keuntungan atau laba usaha yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya peningkatan biaya produksi, adanya persaingan yang ketat, penurunan permintaan, inefisiensi operasional, penyusutan atau kerugian aset, dan adanya fluktuasi harga penjualan (Ananda, 2023). Penurunan margin laba bersih (*net profit margin*) dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan suatu usaha. Kinerja keuangan merujuk pada kemampuan usaha dalam mencapai hasil yang optimal melalui pengelolaan keuangan mereka. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan usaha menghasilkan laba dari modal yang dimiliki (Sari, 2016). Kendala dalam hal kinerja keuangan ini dialami oleh beberapa usaha mikro salah satunya pada bidang usaha kue yaitu UD Suci Sari dan UMK Helena. Kedua usaha ini memiliki masalah pada penggunaan biaya untuk memproduksi produk usaha yang dijualnya. Pada UD Suci Sari, biaya untuk membeli bahan produksi kue tradisional mengalami peningkatan karena adanya lonjakan

permintaan yang signifikan saat masyarakat bersiap untuk merayakan hari raya keagamaan. Begitu pula yang terjadi pada UMK Helena yang memproduksi kue baik kue tradisional maupun kue modern, biaya yang digunakan untuk membeli keperluan memproduksi produk mengalami *cost overrun* (pembengkakan biaya), karena adanya kenaikan harga bahan baku. Peningkatan biaya bahan baku merupakan salah satu faktor utama yang menghambat profitabilitas (Tambunan, 2019). Adanya kelebihan biaya ini sementara harga jual tetap tidak dapat dinaikkan karena persaingan pasar atau daya beli konsumen yang rendah akan berpengaruh pada profitabilitas, yang nantinya akan berdampak negatif pada kinerja keuangan usaha. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa pelaku usaha mikro masih ada yang belum melakukan pengendalian biaya dalam kegiatan operasional usahanya. Padahal dengan adanya pengendalian biaya ini akan memungkinkan usaha mikro untuk lebih efektif dalam pengalokasian sumber daya, dimana informasi ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam proses operasional usaha sehingga nantinya ini akan berpengaruh langsung dan berdampak signifikan pada margin keuntungan usaha.

Penelitian ini dilaksanakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng khususnya Usaha Mikro. Alasan memilih usaha mikro sebagai fokus penelitian dalam kajian ini karena usaha mikro menjadi kategori usaha yang paling banyak dijalankan oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng, dimana usaha mikro di Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebanyak 9.232 unit usaha (Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, 2025). Usaha mikro seringkali menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha karena usaha mikro cenderung memiliki struktur yang lebih sederhana, sehingga dengan penelitian

yang berfokus pada usaha mikro dapat mengidentifikasi praktik efisiensi biaya dan strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi usaha mikro. Selain itu, usaha mikro juga dapat memberikan gambaran yang representatif tentang berbagai aspek yang memengaruhi kinerja keuangan usaha mikro, yakni literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pengendalian biaya.

Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan untuk meneliti variabel terikat. Variabel bebas tersebut ialah pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebagai *research gap* dikarenakan masih jarang digunakan dalam meneliti kinerja keuangan khususnya pada usaha mikro. Berdasarkan latar belakang data di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul mengenai “**Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pengendalian Biaya Terhadap Kinerja Keuangan pada Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Masalah utama yang dihadapi usaha mikro di Kabupaten Buleleng adalah rendahnya tingkat literasi keuangan. Sebagian besar para pelaku usaha mikro tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik mereka cenderung mengelola keuangan usahanya tidak secara sistematis. Kurangnya literasi keuangan ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan keuangan yang tepat dan pada kinerja keuangan secara keseluruhan.

2. Masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mengalokasikan biaya karena pelaku usaha cenderung berperilaku konsumtif dan tidak bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana usaha.
3. Masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengendalikan biaya operasional mereka. Kurangnya pemahaman tentang pengendalian biaya yang efektif dan kesulitan dalam mengidentifikasi sumber pemborosan yang dapat menghambat usaha dalam mengurangi sumber biaya dan meningkatkan profitabilitas.
4. Adanya *research gap* dari terkait beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini, yaitu literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pengendalian biaya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas untuk meminimalisir penafsiran di luar konteks dengan memfokuskan pada pengaruh literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan pada Usaha Mikro yang beroperasi di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng?

2. Apakah Perilaku Keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah Pengendalian Biaya berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang diuraikan, maka peneliti dapat membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku keuangan terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta memperluas ilmu secara teoritis di bidang akuntansi mengenai literasi keuangan, perilaku keuangan, pengendalian biaya dan kinerja keuangan pada usaha mikro.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi UMKM**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pentingnya pemahaman literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng. Usaha Mikro dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan dalam mengelola keuangan usahanya, termasuk meningkatkan literasi keuangan, perilaku keuangan, dan mengoptimalkan penggunaan biaya yang efektif.

**b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro.

**c. Bagi Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau sumber tambahan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

